

ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KONFLIK SOSIAL

Santi Mulyady^{1*}, Adinda Nazla², Fadilah Nur³, Dewa Nugraha⁴, Fatkhuri⁵

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta¹²³⁴⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

¹2310413020@mahasiswa.upnvj.ac.id

²2310413019@mahasiswa.upnvj.ac.id

³2310413031@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴2310413039@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵fatkhuri@upnvj.ac.id

2310413020@mahasiswa.upnvj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, dengan fokus pada dampaknya terhadap masyarakat adat dan perubahan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mengkaji literatur, artikel jurnal ilmiah, serta sumber berita dan dokumen resmi pemerintah terkait isu ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemindahan IKN berpotensi memicu ketegangan sosial, mengancam keberlanjutan pekerjaan tradisional masyarakat adat, dan memperburuk marginalisasi ekonomi mereka. Selain itu, akulturasi budaya antara masyarakat lokal dan pendatang dapat terjadi, berisiko menggerus budaya asli masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu kebijakan dengan menawarkan rekomendasi kebijakan yang inklusif, memperkuat sistem hukum adat, serta mengedepankan pencegahan dini untuk mengelola potensi konflik sosial dalam proses pembangunan IKN.

Kata Kunci: Pemindahan IKN; Konflik Sosial

ABSTRACT

This research aims to analyze the potential social conflicts that may arise due to the relocation of the National Capital City to East Kalimantan. due to the relocation of the National Capital City (IKN) to East Kalimantan, with a focus on the impact on indigenous peoples and cultural change. The impact on indigenous peoples and cultural change. The research method used is a literature study, which examines literature, scientific journal articles, as well as news sources and official government documents related to this issue. news sources and official government documents related to this issue. Research findings show that the relocation of IKN has the potential to trigger social tensions, threaten the sustainability of indigenous peoples' traditional occupations, and exacerbate their economic marginalization. Their economic marginalization. In addition, cultural acculturation between the local community and the migrants may occur, risking the erosion of indigenous culture. This research makes an academic contribution to the development of policy science by offering policy recommendations that are inclusive, strengthen the customary legal system, as well as prioritizing early prevention to manage potential social conflicts in the process of IKN development process of IKN development.

Keywords: Relocation of IKN; Social Conflict.

1. PENDAHULUAN

Ibu kota negara mempunyai fungsi yang strategis, dalam peperangan Ibu Kota Negara selalu menjadi incaran pertama karena adanya anggapan bahwa dapat menguasai ibu kota menjadi jaminan menguasai sebagian besar kekuatan yang dimiliki oleh musuh. China pada masa lalu pernah mengalami kejadian ini di masa lalu, dimana keadaan pemerintahan masih kental dengan sentralisasi dan sedikitnya fleksibilitas pada tingkat provinsi. Disebabkan oleh hal itu, Dinasti Ming memindahkan ibu kota Nanjing ke Beijing agar dapat mengawasi kegiatan musuh dari Mongol dan Manchu (Sutikno, 2007) Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang asing dan telah banyak dilakukan oleh negara lain dengan alasan tertentu. Beberapa diantaranya adalah Brasilia yaitu ibu kota yang berada di pedalaman karena ibu kota lama yaitu Rio Jenairo dianggap sudah terlalu padat. Korea selatan juga menjadi negara yang pernah memindahkan ibu kotanya dari seoul ke sejong pada 2004. Di Indonesia, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun baru dibahas

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

secara serius pada saat kepemimpinan Joko Widodo. Pertimbangan ini didasari oleh perkembangan mengenai ketidakseimbangan sosial lingkungan di Jakarta yang sudah tidak memadai. Jakarta sudah mengalami tekanan besar sebagai Ibu Kota Negara dilihat dari kepadatan penduduk, jumlah kemacetan dan polusi udara. Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak dari bonus demografi pada 2045. Oleh karena itu, pemerintah melihat pemindahan ibu kota sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki distribusi pembangunan dan mengatasi masalah-masalah tersebut (Shalih, 2018). Meskipun tentu saja, pemindahan IKN menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun secara substansial, jika kita mempertimbangkan masa depan Indonesia, negara ini akan menghadapi bonus demografi penduduk pada tahun 2045. Rencana pemindahan ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Bencana alam seperti banjir, kemacetan dan kepadatan penduduk membuat masyarakat menjadi pro dengan kebijakan pemindahan IKN. Di Jakarta mengalami peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang melebihi 10%. Namun, pengembangan infrastruktur seperti jalan baru berlangsung sangat lambat, hanya sekitar 0,05 persen per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin tinggi, bahkan di beberapa ruas jalan berubah menjadi kemacetan parah (Adisasmita dan Adisasmita, 2011). Pemindahan ibu kota dapat memberikan solusi terutama untuk masalah kemacetan dan polusi udara. Di Jakarta, tingkat kemacetan yang semakin parah mengakibatkan keterlambatan rata-rata mencapai 65 jam per tahun, dengan kecepatan rata-rata hanya 20,92 km/jam pada tahun 2023 (INRIX, 2023). Pemindahan ibu kota berpotensi membuat Jakarta mengalami penurunan volume kendaraan dan polusi udara dan mengurangi tekanan pada infrastruktur yang ada menjadikan Jakarta lebih layak huni. Dalam kategori kota paling macet di Asia, Jakarta berada di urutan kedua setelah Istanbul, Turki, yang menempati posisi pertama di Asia dan peringkat keenam dunia. Di Istanbul, tingkat keterlambatan pengemudi mencapai 91 jam dengan kecepatan serupa. Dibandingkan tahun 2022, kondisi kemacetan di Jakarta pada 2023 meningkat sebesar 33%, dari sebelumnya 43,5 jam. Secara global, Jakarta berada di peringkat ke-10 kota dengan dampak kemacetan terburuk pada 2023, naik dari posisi ke-16 pada 2022. Pemindahan ibu kota negara, meskipun diharapkan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di Jakarta, memiliki potensi menimbulkan masalah sosial dan budaya yang harus diperhatikan dengan serius. Pemindahan IKN bukan hanya perpindahan fisik tetapi juga tatanan sosial. Beberapa permasalahan sosial yang dikhawatirkan terjadi adalah konflik tanah, perubahan budaya akibat kedatangan pendatang baru. Penting untuk mengkaji potensi sosial yang akan ditimbulkan dari pemindahan IKN ini sebagai rumusan untuk mengambil kebijakan strategis agar pemindahan ini dapat dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, serta mendukung pemerataan pembangunan yang menjadi tujuan utama dari pemindahan ibu kota. Hidayat (2022) dalam penelitiannya menyoroti konflik agraria yang dihadapi oleh masyarakat adat dikarenakan minimnya partisipasi mereka dalam perencanaan pemindahan IKN. Dalam penelitiannya belum mengeksplorasi langkah mitigasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif. Dalam penelitian lain yaitu Mazda (2022) menjelaskan bahwa potensi IKN untuk mencapai redistribusi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial namun belum menganalisis tantangan sosial yang dihadapi masyarakat akibat perubahan besar. Terdapat gap penelitian yang signifikan yaitu penelitian sejauh ini hanya berfokus pada aspek ekonomi, lingkungan dan infrastruktur namun masih minim dalam kajian sosial dan budaya. Dampak sosial seperti hak tanah masyarakat adat dan perubahan budaya belum menjadi perhatian dalam penelitian. Selain itu hak masyarakat adat, potensi konflik antar kelompok belum banyak dieksplorasi. Selanjutnya rekomendasi kebijakan pencegahan bersifat teknis dan ekonomis tanpa menyertakan solusi strategis untuk mitigasi konflik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai potensi konflik sosial sehingga dapat merumuskan kebijakan strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN yang inklusif.

2. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Teori Konflik Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia tentu saja selalu berinteraksi dengan manusia lain. Manusia sekitar pasti pernah merasakan konflik dan perbedaan dengan manusia lainnya. Manusia memiliki sifat dasar tidak pernah merasa puas dan kebutuhan yang tidak ada habisnya. Konflik sosial adalah perselisihan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan Bersama dengan cara saling bertentangan yang melibatkan ancaman dan kejahatan (Soekanto, 2012). Penelitian dampak konflik sosial ini akan dianalisis menggunakan teori konflik sosial dari Lewis A Coser. Coser membagi konflik sosial kepada 2 bagian yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik dan non realistik merupakan sumbangan dari Coser yang diadaptasi dari hasil pemikiran Simmel. Coser juga berpendapat bahwa konflik tidak selalu berakhir negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif dan memberi sumbangan terhadap individu atau kelompok serta sistem sosial. Menurut Coser konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak perlu dihindari keberadaannya. Coser mengatakan bahwa terdapat dua konsep konflik sosial, yaitu konsep konflik realistik dan konflik non-realistis yaitu sebagai berikut:

A. Konflik Realistis

Konflik realistis adalah situasi yang bermula dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang berada di masyarakat.

B. Konflik Non-realistis

(Coser, 1956: 49) Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi konflik tersebut muncul dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, yang terdiri dari salah satu pihak

Ibu Kota

Ibu kota atau capital city adalah tempat atau wilayah yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, kegiatan perkantoran, pusat berkumpulnya para petinggi negara. Dalam bahasa latin ibu kota disebut dengan caput yang berarti kepala dan sering dikaitkan dengan letak wilayah pusat pemerintahan, ekonomi dan budaya. Ibu kota memiliki fungsi strategis sebagai pusat dari politik dan ekonomi sehingga keberadaanya memiliki peranan yang penting bagi negara. Ibu kota sering dijadikan oleh beberapa negara sebagai pusat dari perwakilan keunikan dan keistimewaan. Perannya juga berfungsi untuk mengenalkan kepada negara luar mengenai karakter dan identitas negara. Ibu kota menjadi pusat dari segala kegiatan menjadikannya tujuan urbanisasi. Beberapa negara membangun ibu kota dengan cara yang beragam, ada yang melanjutkan kota yang sudah ada di masa lalu dan juga ada yang membangun ibu kota baru.

Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibukota negara adalah suatu tindakan strategis yang melibatkan perpindahan pusat pemerintahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tindakan ini sering kali diambil untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Edward Schatz (2003), "capital relocation (i.e., the physical move of the central state apparatus from one location to another) is an unusual tool for nation and state building." Pemindahan ibukota tidak hanya mencerminkan perubahan geografis, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat legitimasi politik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan membangun identitas nasional yang lebih kohesif. Dalam banyak kasus, pemindahan ibukota dapat dilihat sebagai alat untuk membangun negara dan bangsa. Schatz (2003) menjelaskan bahwa "the relocation of a capital city creates an opportunity to reward supporters and undermine rivals in the context of constructing effective institutions." Dengan memindahkan ibukota, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengubah jaringan kekuasaan yang ada, menciptakan patronase baru, dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, pemindahan ibukota juga memiliki dimensi simbolis yang penting. Schatz (2003) mencatat bahwa "state building involves not only creating a physical infrastructure but also constructing a symbolic apparatus to propagate ideas of a leader's political legitimacy." Dengan mendirikan ibukota baru, pemerintah tidak hanya menciptakan pusat administratif, tetapi juga memperkuat citra negara di mata internasional dan menegaskan identitas nasional yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa pemindahan ibukota dapat berfungsi sebagai strategi untuk membangun legitimasi politik dan menciptakan kesatuan di tengah keragaman etnis. Secara keseluruhan, pemindahan ibukota negara adalah langkah yang kompleks dan multifaset, mencerminkan upaya untuk membangun negara yang lebih stabil dan terintegrasi. Dalam konteks Kazakhstan, pemindahan ibukota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997 menjadi contoh nyata dari bagaimana langkah ini dapat digunakan untuk mengatasi tantangan pembangunan negara dan membangun kesatuan di tengah keragaman. Seperti yang dinyatakan oleh Schatz (2003), "nation building involves creating a minimal popular allegiance to a broad cultural community," yang menunjukkan bahwa pemindahan ibukota dapat berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan identitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka atau studi kepustakaan (Sujarweni 2014). Kajian Pustaka atau studi kepustakaan yaitu mengkaji studi-studi atau teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Selain itu, situs-situs berita dan situs resmi negara juga digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, investasi dan pembangunan di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa terutama di Jakarta. Keadaan ini mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang membebani suatu wilayah. Berdasarkan keterangan dari Climate Central atau organisasi independen ilmuwan dan jurnalis terkemuka Jakarta diproyeksikan akan tenggelam pada tahun 2030 berdasarkan data elevasi CoastalDEM®. Pemindahan IKN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

2019). Menurut keterangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 6 alasan pemindahan Ibu Kota Negara,

1. Penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa hampir menyentuh angka 60% hal ini sangat berbanding terbalik dengan penduduk di wilayah pulau lain yang hanya mencapai (<10%)
2. PDB di pulau jawa yang mencapai kontribusi sebesar 58,49%
3. Krisis air bersih yg melanda di Pulau Jawa dan DKI Jakarta
4. Pada tahun 2020 terjadi konvensi lahan di Pulau Jawa sebesar 44,4%
5. Terjadinya urbanisasi yang besar dan pesat di Pulau Jawa
6. Menurunnya daya dukung lingkungan di Jakarta menimbulkan besarnya kerugian di sektor ekonomi

Dalam menyelesaikan beberapa permasalahan diatas Bappenas mulai menentukan kriteria lingkungan yang cocok untuk memindahkan Ibu Kota yaitu

1. Berada di tengah wilayah Indonesia supaya terciptanya keadilan dan pengembangan wilayah yang merata serta terjangkau
2. Wilayah baru harus berdekatan dengan wilayah perkotaan untuk mempermudah akses dan investasi di wilayah ibu kota baru
3. Wilayah baru juga harus memiliki resiko bencana yang rendah dan perimeter keamanan yang baik
4. Wilayah ibu kota baru merupakan wilayah yang bebas dari polusi dan memiliki sumber daya air
5. Infrastruktur lengkap
6. Wilayah baru harus memiliki lahan yang luas untuk mengurangi pembiayaan investasi

Berdasarkan kriteria diatas wilayah Kalimantan Timur merupakan wilayah baru yang ideal dalam membangun ibu kota baru lebih tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur saat ini mencapai 3,77 juta jiwa yang akan terus bertambah menjadi 11 juta jiwa pada Tahun 2030 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, 2021). Pemindahan IKN diprediksi akan mengalami kendala dari segi sosial yaitu konflik sosial, jika tidak adanya penanganan atau pemikiran yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dan kebudayaan lokalnya.

4.1. Potensi Konflik Sosial Di Ibu Kota Negara Baru

1. Memperburuk Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur semakin memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Otoritas IKN mengeluarkan ultimatum yang memaksa masyarakat adat untuk meninggalkan tanah mereka. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pengusiran yang mengancam identitas budaya masyarakat adat. Proses pengadaan lahan untuk proyek IKN berdampak besar pada kehidupan masyarakat adat di Kalimantan Timur. Sebelum lahan mereka dialihkan, masyarakat adat mengandalkan tanah tersebut untuk berbagai kegiatan mata pencaharian, seperti bertani dan berburu. Namun, setelah pengalihan lahan, banyak dari mereka kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa hilangnya pekerjaan terutama terjadi pada sektor pertanian dan pengelolaan hutan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat adat (Aulia et al., 2023). Selain itu, kajian dampak sosial juga mengungkapkan bahwa pemindahan IKN membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan budaya masyarakat adat (Masitah & Dewi, 2022). Kehilangan tanah tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memutus hubungan spiritual dan budaya masyarakat adat dengan tanah mereka. Proyek ini juga memicu konflik agraria yang menghambat perkembangan IKN, dengan banyak lahan yang masih disengketakan dan belum dapat dikuasai oleh pemerintah akibat masalah yang belum terselesaikan.

2. Meledaknya Urbanisasi

Urbanisasi massal yang tidak terkontrol menjadi salah satu tantangan utama. Meski Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat ekonomi Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya akan berkembang menjadi target ekonomi baru atau alternatif. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan bahwa jumlah penduduk di Kalimantan Timur akan terus bertambah, diproyeksikan mencapai 10-11 juta jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan ini membutuhkan kesiapan untuk mengatasi berbagai risiko, seperti ketimpangan sosial, konflik antara penduduk lokal dan pendatang, meningkatnya kemiskinan, munculnya permukiman kumuh, kejahatan, hingga kerusakan lingkungan. Interaksi antara penduduk lokal dan pendatang dapat berdampak pada budaya lokal di Kalimantan Timur.

3. Marginalisasi Masyarakat Lokal

Pembangunan IKN, misalnya, dapat memunculkan ancaman marginalisasi masyarakat lokal. Salah satu dampak transformasi ekonomi yang dirasakan adalah tergantikannya pekerjaan tradisional masyarakat lokal. Banyak yang

kehilangan ladang untuk berkebun harus mencari pekerjaan baru, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak masih terbatas. Di sisi lain, pembangunan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seiring masuknya investasi dari perusahaan dan industri. Namun, kehadiran pendatang dan investor menimbulkan berbagai potensi masalah. Dibandingkan dengan masyarakat lokal atau pendatang, investor cenderung mendapatkan keistimewaan, terutama melalui perlindungan hukum sesuai kesepakatan mereka dengan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat adat sebagai penduduk asli wilayah tersebut berisiko hanya menjadi pekerja buruh, sementara persaingan kerja dengan pendatang semakin meningkat. Dominasi investor dalam sektor ekonomi juga sulit dihindari, memperburuk ketimpangan antara masyarakat lokal dan pihak luar.

4. Pudarnya Budaya Lokal

Akulturasasi atau bahkan asimilasi budaya kemungkinan besar akan terjadi, menciptakan budaya baru yang menggabungkan elemen lokal dan pendatang. Namun, risiko terbesar adalah hilangnya budaya asli apabila masyarakat lokal gagal mempertahankan tradisi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah melalui kebijakan atau peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya lokal. Kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan masa depan negara, termasuk dalam menghadapi potensi dan risiko yang muncul.

4.2. Penanganan Konflik Sosial Di Ibu Kota Negara Baru

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 26 Pada Tahun 2017 penanganan Konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sistematis dan terencana pada sebelum, pada saat dan sesudah peristiwa atau konflik yang mencakup pencegahan konflik, penanganan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik sosial adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan mengadakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewaspadaan dini. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial meliputi sandang, pangan dan papan. Selanjutnya pemulihan pasca konflik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat. Dalam mewujudkan pemindahan IKN yang inklusif pemerintah perlu memperhatikan dan merumuskan kebijakan konkret yang inklusif dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan sehingga konflik sosial dapat ditangani dengan baik. Beberapa penanganan konflik sosial yang dapat dilakukan berdasarkan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

1. Memelihara Kondisi Damai dalam Masyarakat

Menurut Johan Galtung (2019) untuk mencapai kondisi damai, setiap individu atau masyarakat perlu memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Nilai-nilai perdamaian pada dasarnya merupakan dorongan bawaan dalam diri manusia. Menjalinkan dialog dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat baik lokal maupun pendatang sangat penting. Dialog yang konstruktif dapat mawadahi segala perbedaan dan konflik sehingga solusi dapat dicari bersamaan dan solusi yang dikeluarkan bersifat inklusif. Pelibatan masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pemindahan juga merupakan hal yang penting supaya masyarakat merasa mendapat pengakuan. Menurut Prof. Musta'in (2024) masyarakat lokal belum menerima sepenuhnya dikarenakan belum merasa diperhatikan, partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemindahan IKN sangat penting.

2. Penguatan Sistem Hukum Adat

Penghormatan, pengakuan dan penguatan sistem hukum adat yang ada di Kalimantan Timur juga diperlukan dalam upaya penanganan konflik sosial yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui tradisi lokal dan melibatkan tokoh adat.

3. Membangun Sistem Pencegahan Dini

Diadakan sistem pencegahan dini konflik sosial memperbesar kemungkinan melakukan diskusi, dialog dan negosiasi dari pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan mediator dan fasilitator yang netral sehingga dialog yang konstruktif dapat terwujud. Dengan adanya sistem ini dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan seperti kehilangan nyawa, cedera fisik dan ketidakstabilan politik. Sistem ini membantu menjaga kerukunan dan hubungan harmonis dengan pemerintah masyarakat. Dengan sistem ini dapat mendeteksi potensi konflik sosial, indikator konflik dan pemantauan konflik menuju solusi yang inklusif. Pemindahan IKN adalah agenda yang strategis namun kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dibutuhkan perencanaan yang matang, dialog dan kebijakan inklusif agar pemindahan IKN berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk keseluruhan. Untuk mengatasi konflik pemerintah harus terus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan konsultasi kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga perlu memperhatikan hak masyarakat adat serta pemilik tanah dan memberikan kompensasi yang adil dengan memperhatikan kelangsungan mata pencaharian mereka. Kebijakan redistribusi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang inklusif harus diimplementasikan untuk meminimalkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi.

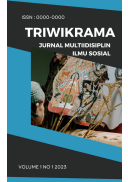
5. SIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur semakin memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Ultimatum yang dikeluarkan oleh otoritas IKN yang memaksa masyarakat adat untuk meninggalkan tanah mereka merupakan bentuk pengusiran tidak hormat dan dianggap mengancam identitas budaya mereka. Proses ini sangat berdampak besar pada kehidupan masyarakat adat di Kalimantan Timur. Masyarakat adat sangat mengandalkan lahan mereka untuk mata pencaharian seperti bertani dan berburu. Penelitian menunjukkan bahwa hilangnya tanah masyarakat adat dapat menyebabkan pergeseran budaya dan mata pencaharian. Kehilangan tanah tidak hanya memutus hubungan spiritual budaya masyarakat adat dengan tanah mereka.

Pembangunan IKN dapat memunculkan ancaman marginalisasi masyarakat lokal. Banyak yang kehilangan ladang dan harus mencari pekerjaan baru namun tidak mempunyai skill bersaing dengan pendatang baru sehingga memicu konflik sosial, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pergeseran budaya masih kurang. Sebaliknya, Investor diberikan hak istimewa terutama terkait perlindungan hukum sesuai kesepakatan dengan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini menimbulkan konflik diantara masyarakat adat dan pemerintah. Menjalinkan dialog antara masyarakat adat atau lokal dengan pemerintah sangat diperlukan. Dialog yang konstruktif dapat mewujudkan segala perbedaan dan konflik sehingga solusi dapat dicari bersamaan dan solusi yang dikeluarkan bersifat inklusif. Pelibatan masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pemindahan juga merupakan hal yang penting supaya masyarakat merasa mendapat pengakuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, E. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Coser, Lewis. 1956. The Function of Social Conflict. New York: Free Press.
- Eviany, E. 2019. Teknik Membangun Konsensus. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN. Hal. 43
- Fitriyah, A. (2024). Dualisme Hak Tanah dalam Penggusuran
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183-203.
- Hidayat, R. (2022). Konflik agraria masyarakat adat dalam pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Pendidikan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta*.
- Limas, C., Setyaningsih, O., & Fauzi, I. (2021). Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 23(2), 77-94.
- Masyarakat Adat IKN. *UNAIRNews*. <https://unair.ac.id/pakar-unair-sebut-dualisme-hak-tanah-dalam-penggusuran-masyarakat-adat-ikn/>
- Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/>
- Kurniawan, M. R., Wicaksono, R. A., Munthe, J. A., Hidayat, V. Y., & Arifin, A. (2024). Membangun Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) baru yang Berlandaskan Pancasila: Menuju Indonesia Emas 2045. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Papua, B. P. S. P. (2021). *Indeks Pembangunan manusia provinsi Papua Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>.
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153-166.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda. (2021). Sistem Transportasi cerdas di Ibu Kota Negara Pembangunan dan Kebutuhan Penerapannya. https://www.youtube.com/watch?v=vm7d9DCN_is
- Schatz, Edward. (2003). *When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building*. Working Paper #303. Southern Illinois University Carbondale.



Shalih et al. (2018). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Penelitian*, 4(1), 45–60.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press.

Ulil Absor, M., Mubarak, M. Z., Puspitaningrum, S. D., & Susilo, J. (2023). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(5), 1052–1063.

Universitas Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*.

Zia Ulhaq, J., Darwis, M., & Rudiadi. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3